

Capacity Building Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (PKK) Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

Fadel Ilato, Rizki Ayundari Putri, Detyo Eka Cahya Salim

(Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo)

Fadelilato222@gmail.com , ayundarie09@gmail.com

Abstract: *The Family Welfare Empowerment Program (PKK) is essential as a community organization to empower women to participate in village development. In this case, women are also involved in a particular organization and can participate in village development by encouraging the participation of village communities. The method of implementing community service that is carried out is the Community Organization / Community Development (CO / CD) Method. The Community Organization / Community Development (CO / CD) method is one of the methods in social work practice with the main focus being the wider community or community with activities that involve the community to increase the level of social functioning of the community, especially in community self-involvement of Family Welfare Empowerment Program (PKK) organizations in Ilangata Village. The techniques implemented in this community service activity are observation, interviews, and Methodology Participatory Assessment (MPA). The stages of implementing this community service activity are social initiation, social organizing, social assessment, social intervention planning, and social intervention. The result of community service activities that have been carried out is the implementation of capacity-building activities for the Ilangata Village Family Welfare Empowerment (PKK) organization, which consists of reactivating organizations supported by the Decree of the Head of Ilangata Village concerning the Establishment and Appointment of the Ilangata Village Family Welfare Empowerment (PKK) Management Number 41 of 2022, capacity building resources through the provision of entrepreneurship materials and training for members of the Ilangata Village Family Welfare Empowerment Program (PKK) organization.*

Keywords: Capacity Building; Organization; Empowerment; Family Welfare.

Abstrak: Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki peranan penting sebagai organisasi kemasyarakatan guna memberdayakan para perempuan agar turut berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Dalam hal ini, kaum perempuan juga punya bagian untuk terlibat dalam sebuah organisasi tertentu dan dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan menggerakkan partisipasi masyarakat desa. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan yakni Metode *Community Organization/ Community Development* (CO/CD). Metode *Community Organization/*

Community Development (CO/CD) merupakan salah satu metode dalam praktik pekerjaan sosial dengan fokus utama yakni komunitas atau masyarakat yang lebih luas dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan tingkat keberfungsian sosial masyarakat terutama dalam pelibatan diri masyarakat terhadap organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Ilangata. Adapun teknik-teknik yang dilaksanakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini yakni observasi, wawancara, dan *Methodology Participatory of Assessment (MPA)*. Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen sosial, perencanaan intervensi sosial, dan intervensi sosial. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan yakni terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata yang terdiri dari pengaktifan kembali organisasi yang didukung dengan Surat Keputusan Kepala Desa Ilangata Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus TP. PKK Desa Ilangata Nomor 41 Tahun 2022, peningkatan kapasitas sumber daya melalui pemberian materi dan pelatihan kewirausahaan bagi anggota-anggota organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata.

Kata Kunci: Peningkatan Kapasitas; Organisasi; Pemberdayaan; Kesejahteraan Keluarga.

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia saat ini telah berkembang sangat pesat yang meliputi berbagai aspek seperti sosial, politik, ekonomi, maupun Pendidikan. Pelaksanaan pembangunan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia seperti pembangunan di perkotaan dan pembangunan di pedesaan. Pembangunan di pedesaan tidak kalah berkembangnya dengan pembangunan yang dilakukan di daerah perkotaan. Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pembangunan desa. Upaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan kelompok-kelompok salah satunya organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki peranan penting sebagai organisasi kemasyarakatan guna memberdayakan para perempuan agar turut berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Dalam hal ini, kaum perempuan juga punya bagian untuk terlibat dalam sebuah organisasi tertentu dan dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan menggerakkan partisipasi masyarakat desa.

Sejarah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada awalnya bernama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan untuk melibatkan partisipasi perempuan melalui program Pendidikan perempuan. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1972 organisasi tersebut berubah nama menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan untuk membina dan membangun keluarga di bidang mental, spiritual dan fisik serta peningkatan mutu pangan, sandang, Kesehatan, dan lingkungan hidup. Anggota yang terlibat dalam organisasi ini yakni tokoh atau pemuka masyarakat, para isteri Kepala Dinas atau Jawatan dan isteri Kepala Daerah sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan yang

kegiatannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dengan adanya reformasi serta paradigma baru dan semangat otonomi daerah, sejak tahun 1999 berubah lagi menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada awalnya diarahkan untuk mendorong kemajuan perempuan agar dapat memainkan peran gandanya secara baik yaitu sebagai pengelola keluarga, pencari nafkah dan pelaku pembangunan. Akan tetapi sesuai dengan perkembangannya, program pemberdayaan perempuan kemudian diarahkan untuk mewujudkan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Organisasi PKK ini tentunya menjadi salah satu organisasi gerakan dalam mendukung dan membantu program-program Pemerintah dengan mendata beberapa segala aspek yang sangat diperlukan seperti data warga, data ibu hamil, bayi, balita, kelahiran, kematian sampai pada kegiatan masyarakat. PKK juga selalu memberikan pemahaman tentang agama yang kurang tepat, tentang pelarangan dalam penggunaan alat kontrasepsi termasuk mereka harus memberikan penjelasan yang jelas tentang manfaat dari program KB kepada masyarakat yang rata-rata memiliki pendidikan rendah, dan juga membantu korban kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga pada masyarakat. PKK juga berkonsentrasi dalam membela kaum miskin yang kelaparan dengan cara memberikan bantuan ekonomi pada kaum perempuan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, PKK mempunyai 10 program kerja yang merefleksikan kebutuhan dasar manusia Indonesia, yaitu: 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila, 2) gotong royong, 3) pangan, 4) sandang, 5) perumahan dan tatalaksana rumah tangga, 6) pendidikan dan keterampilan, 7) kesehatan, 8) pengembangan kehidupan berkoperasi, 9) kelestarian lingkungan hidup, 10) perencanaan sehat. Program Kerja PKK tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok program, yakni:

- a. Program Pokok: memenuhi kebutuhan dasar dan terwujudnya kesejahteraan keluarga yang dikenal dengan sebutan 10 Program Pokok PKK.
- b. Program Prioritas (5 tahun): disebut juga Program Keutamaan, adalah kumpulan program yang merupakan penjabaran dari 10 Program Pokok PKK sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dianggap mendesak.
- c. Program Kerja Tahunan: adalah kumpulan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program prioritas untuk kurun satu tahun anggaran yang pelaksanaannya dapat merupakan kegiatan Tim Penggerak PKK sendiri atau pun kegiatan unit atau instansi yang dikerjasamakan dengan Tim Penggerak PKK. Tim Penggerak PKK adalah pengelola gerakan PKK yang berada di tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan yang tugasnya

mengelola dan menggerakkan kegiatan PKK; diketuai oleh isteri pimpinan daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah), secara fungsional.

Adapun penanggungjawab pelaksanaan program pokok PKK yakni 5 (lima) kelompok kerja (Pokja) yang bersifat koordinatif satu sama lain, yaitu:

- a. Pokja I, mempunyai ruang lingkup mengelola program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan program gotong royong.
- b. Pokja II, mempunyai ruang lingkup mengelola program Pendidikan, Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
- c. Pokja III, mempunyai ruang lingkup mengelola program Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.
- d. Pokja IV, mempunyai ruang lingkup mengelola program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

Desa Ilangata merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Desa Ilangata merupakan desa yang ditetapkan sebagai ibu kota kecamatan anggrek dan berjarak ± 18 KM dari kwandang sebagai ibu Kota Kabupaten Gorontalo Utara. Berbagai macam pembangunan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Ilangata salah satunya dengan membentuk wadah organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Akan tetapi berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, diketahui bahwa organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Ilangata tidak aktif. Sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi dan menghambat pembangunan Desa Ilangata.

Ketidakaktifan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Ilangata awalnya disebabkan karena adanya pergantian Kepala Desa pada tahun 2021 dan pergantian kembali di Tahun 2022 yang saat ini menjabat yakni Bapak Sumarjin Moohulo. Hal tersebut mengakibatkan ketua organisasi yang dalam hal ini adalah isteri dari Kepala Desa menjadi berganti-ganti, sehingga anggota organisasi yang lainnya menjadi tidak aktif dan tidak serius dalam menjalankan program-programnya.

Faktor lain yang menyebabkan organisasi tidak aktif yakni dilihat dari sumber daya manusia yang ada belum semuanya mempunyai pengetahuan, nilai, dan keterampilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian masih kurangnya minat bagi anggota yang tidak mau melibatkan diri atau berpartisipasi pada Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata. Dengan demikian peneliti tertarik melakukan pengabdian masyarakat di Desa Ilangata dengan judul program yakni "*Capacity Building* Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara".

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan yakni Metode *Community Organization/ Community Development (CO/CD)*. Metode *Community Organization/ Community Development (CO/CD)* merupakan salah satu metode dalam praktik pekerjaan sosial dengan fokus utama yakni komunitas atau masyarakat yang lebih luas dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan tingkat keberfungsian sosial masyarakat terutama dalam pelibatan diri masyarakat terhadap organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Ilangata. Adapun teknik-teknik yang dilaksanakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini yakni observasi, wawancara, dan *Methodology Participatory of Assessment (MPA)*.

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan-tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan disesuaikan dengan tahapan intervensi sosial. Adapun tahapan pelaksanaannya yakni:

Inisiasi Sosial

Tahapan inisiasi sosial merupakan sebuah tahapan awal yang harus dilakukan dengan berkunjung ke Pemerintah Desa Ilangata. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan diri, mencari informasi awal, serta membangun *trust building* dengan aparat Desa dan masyarakat Desa Ilangata. Inisiasi sosial ini juga bisa berisi perkenalan dan pengondisian awal masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan pada hari Senin 24 Oktober 2022. Aparat Desa Ilangata terutama Kepala Desa Ilangata menyambut kedatangan peneliti dengan baik dan ramah. Langkah berikutnya, Peneliti membangun *trust building* dengan aparat Desa dan menjelaskan secara rinci terkait program yang akan dijalankan pada kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Ilangata.

Dengan adanya proses dalam membangun *trust building* bersama dengan aparat Desa Ilangata dan beberapa *stake holder* dalam masyarakat, peneliti mendapatkan sambutan yang hangat dari aparat Desa Ilangata terutama dari Kepala Desa Ilangata yakni Bapak Sumarjin Moohulo. Kemudian terbangunlah *image* yang baik, terjalin relasi yang kuat dengan berbagai aparat Desa dan *stake holder* di masyarakat terutama kepada Dusun. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya inisiatif dari aparat Desa Ilangata dalam membantu peneliti dalam menjalankan program pengabdian masyarakat, salah satunya mengumpulkan beberapa anggota Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang masih aktif.

Pengorganisasian Sosial

Pengorganisasian sosial adalah proses pelibatan aparat Desa Ilangata dan beberapa *stakeholder* dalam masyarakat dalam segala bentuk aktivitas yang akan dilakukan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengorganisasian ini merupakan tahapan lanjutan dari inisiasi sosial yang dilakukan sebelumnya di Desa Ilangata. Pada tahapan ini

peneliti melakukan *home visit* kepada anggota-anggota kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai bentuk pendekatan untuk melakukan pengorganisasian sosial ini.

Setelah proses inisiasi sosial dilakukan, maka selanjutnya peneliti mempersiapkan pelaksanaan pengorganisasian sosial. Untuk pelaksanaan pengorganisasian, peneliti mengadakan kegiatan rembug warga atau *community meeting* dengan menggunakan teknologi pekerja sosial yakni *Methodology Participatory of Assessment* (MPA). Peserta yang diundang dalam kegiatan ini berasal dari seluruh anggota Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), beberapa kader posyandu Desa Ilangata, dan aparat Desa Ilangata.

Rembug warga atau *community meeting* dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 bertempat di Aula Desa Ilangata yang dimulai pukul 13.00 WITA. Adapun rincian kegiatan rembug warga atau *community meeting* terdiri dari beberapa susunan kegiatan yakni:

- a. Pembukaan oleh pembawa acara
- b. Sambutan-sambutan dari berbagai pihak. Sambutan pertama dari Kepala Desa yaitu Sumarjin Moohulo, sambutan kedua dari peneliti selaku dosen pembimbing lapangan.
- c. Penyampaian atau pemaparan terkait maksud dan tujuan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Ilangata dan pentingnya organisasi kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Ilangata oleh narasumber yaitu Rizki Ayundari Putri, M.Tr.Sos.
- d. Penerapan teknologi *Methodology Participatory of Assessment* (MPA) yang difasilitasi oleh tim penelitian. Peserta rembug warga untuk secara bersama-sama mengklarifikasi, menambahkan dan menemukan masalah, apabila terdapat informasi yang salah. Hasil MPA tersebut menarik beberapa isu permasalahan yang akan diangkat oleh tim penelitian untuk diintervensi.
- e. Acara terakhir yaitu melakukan peninjauan partisipatif bagi peserta rembug warga, untuk terlibat secara *collective* dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Desa Ilangata yang dinamakan *interest group*.

Rembug warga ini menghasilkan beberapa isu terkait permasalahan yang ada di organisasi Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Ilangata yang menurut anggotanya layak untuk dilakukan perubahan dan ditangani. Adapun permasalahan yang dimaksudkan yakni:

- a. Minimnya anggaran yang terdistribusi dalam organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sehingga menyebabkan kurangnya animo berpartisipasi dalam kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Ilangata.

- b. Minimnya pemahaman terkait tugas dan peran dari tiap-tiap anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Ilangata.
- c. Kurangnya kesadaran diri tiap-tiap anggota untuk aktif dalam setiap kegiatan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), hal tersebut berpengaruh bagi kekompakkan dari anggota itu sendiri.
- d. Belum adanya SK Kepala Desa tentang pengangkatan pengurus organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Ilangata.
- e. Kurangnya pelatihan yang diberikan bagi anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sehingga *skill* yang dimiliki masih rendah.
- f. Belum adanya keterampilan yang diberikan dalam menjalankan kewirausahaan bagi organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terutama dalam menciptakan produk mereka sendiri agar mereka dapat mandiri dan memiliki dana tambahan.

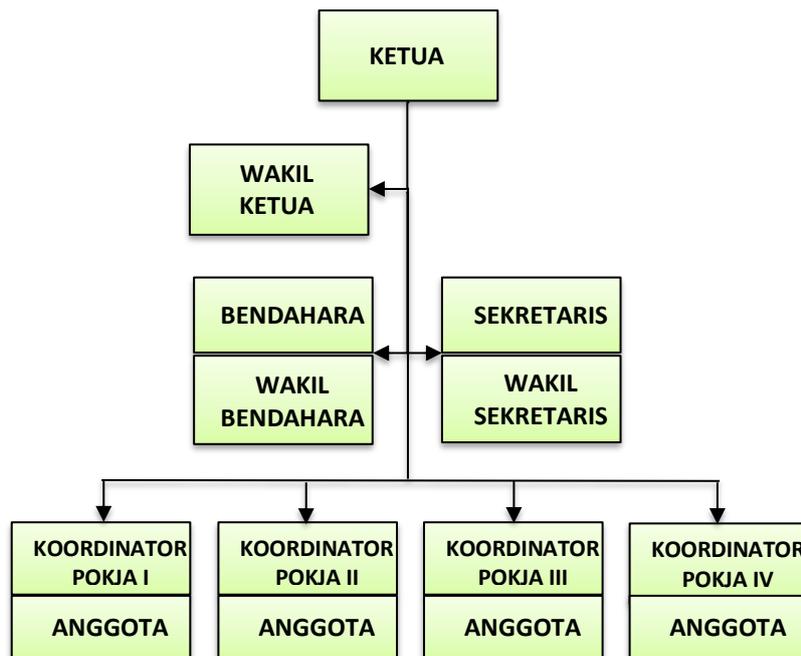


Gambar 1. Kegiatan rembug warga dengan menggunakan teknologi MPA

Setelah isu permasalahan ditentukan, proses selanjutnya yaitu menentukan prioritas masalah yang nanti akan menjadi acuan dalam pelaksanaan intervensi.

Asesmen Sosial

Asesmen sosial adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukenali masalah, potensi dan sumber lebih lanjut dengan melihat hasil dari kegiatan *community meeting* atau rembug warga yang telah dilakukan sebelumnya, sebagai bentuk penyempurnaan informasi-informasi yang telah diperoleh di Desa Ilangata terutama yang berkaitan dengan masalah organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata. Asesmen yang dilakukan terdiri dari asesmen awal dan asesmen lanjutan. Teknik yang digunakan dalam asesmen sosial ini yakni teknik wawancara secara mendalam. Adapun hasil asesmen yang diperoleh yakni terdapat berbagai macam permasalahan yang menghambat berjalannya organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata dan susunan struktur organisasi yang ideal bagi kader PKK.



Bagan 1. Struktur Organisasi Kader Pemberdayaan Kesejahteraan (PKK) Desa Ilangata

Adapun target dalam kegiatan asesmen sosial yakni Ibu-Ibu Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan mendatangi kediaman dari tiap-tiap anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Peneliti melakukan wawancara mendalam sebagai upaya menggali informasi dan memperjelas permasalahan yang telah diperoleh sebelumnya di tahapan pengorganisasian sosial, sehingga peneliti dapat menentukan cara pemecahan masalahnya. Adapun hasil wawancara yakni:

- a. Beberapa anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mengeluhkan persoalan anggaran sebagai penunjang berjalannya organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- b. Kepemimpinan Desa yang berganti-ganti dalam waktu singkat, sehingga mengakibatkan ketua organisasi yang berganti-ganti pula.
- c. Masih banyak anggota organisasi yang tidak aktif, sehingga menghambat berjalannya kegiatan di tiap-tiap POKJA organisasi PKK.
- d. Kurangnya pemahaman tentang peran, tugas dan fungsi dari tiap-tiap anggota organisasi PKK.

Perencanaan Intervensi

Perencanaan intervensi yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi perencanaan program yang akan dijalankan nanti. Perencanaan ini dilakukan untuk mempersiapkan proses intervensi agar sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan sumber yang ada di dalam lingkup Desa Ilangata. Perencanaan sosial merupakan tindak lanjut dari hasil

asesmen sosial terhadap permasalahan yang berkaitan dengan organisasi Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pada tahapan ini peneliti memaparkan kembali hasil *Methodology Participatory of Assessment* (MPA) yang dilakukan saat kegiatan *community meeting* dan hasil asesmen sosial dengan menggunakan teknik wawancara untuk ditindaklanjuti rencana tindak pemecahan masalah bersama dengan Kepala Desa dan anggota kader PKK yang masih aktif. Adapun perencanaan intervensi yang akan dilakukan yakni:

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang Tata Kelola Organisasi PKK Di Desa Ilangata
- b. *Capacity Building* Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata. Adapun kegiatan didalamnya meliputi:
 - 1) Revitalisasi organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Ilangata.
 - 2) Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas di masing-masing Program Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
 - 3) Pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- c. Pembentukan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) periode 2022 – 2027.

Rujukan Terdahulu

Pengembangan Kapasitas Kewirausahaan Perempuan Kepala Keluarga di Kp. Sindanglayung Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Rizki Ayundari Putri (2020).

Pengembangan kapasitas suatu pendekatan pembangunan dimana semua orang memiliki hak yang sama terhadap sumber daya dan menjadi perencanaan bagi diri mereka terutama bagi perempuan kepala keluarga di Kp. Sindanglayung Desa Cibadak Kabupaten Cianjur. Kondisi awal dari keluarga miskin Desa Cibadak yakni menunjukkan lemahnya kemampuan pelaksanaan fungsi perempuan sebagai kepala keluarga. Lemahnya kemampuan fungsi perempuan kepala keluarga ini ditandai dengan beberapa masalah yang dialami oleh perempuan kepala keluarga yakni belum dapat menjalankan peran dengan baik sebagai seorang ayah yang mencari nafkah dan melindungi serta peran ibu mendidik dan mengerjakan semua pekerjaan rumah dengan baik. Kondisi awal lain yang ditunjukkan yakni minimnya keterampilan perempuan kepala keluarga dalam berwirausaha atau keterampilannya dalam menghasilkan sesuatu untuk diproduksi sehingga dapat membantu perekonomian mereka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder yang dimana mengarah ke arah kualitatif. Penelitian ini melibatkan tujuh orang informan

diantaranya 4 empat orang informan inti yang merupakan perempuan kepala keluarga di Kp. Sindanglayung Desa Cibadak dan tiga orang informan pendukung yang terdiri dari staff Yayasan Usaha Mulia (YUM) Cipanas, Kader PKK, dan aparat Desa Cibadak. Teknik pengumpulan data ini melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan mengacu analisis kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan pertimbangan ahli.

Gagasan desain model pengembangan kapasitas kewirausahaan perempuan kepalakeluarga yang diusulkan yakni penyuluhan peran dan fungsi perempuan, pelatihan manajemen *wallet organizer*, dan pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Kemudian gagasan desain model ini disempurnakan dengan pertimbangan ahli. Adapun hasil pertimbangan ahli yakni bentuk kegiatan pada gagasan desain model pengembangan kapasitas disusun menjadi penyuluhan peran dan fungsi kepala perempuan keluarga, pelatihan manajemen *wallet eco friendly organizer*, dan pelatihan berbasis potensi lokal "*How to make wallet local eco friendly*". Pelaksanaan desain model yang diusulkan diharapkan mampu di monitoring dan di evaluasi sesuai dengan prosedur. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan nantinya dapat menyempurnakan desain model yang diusulkan peneliti. Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Nikma Wahyuni Hanis, dkk (2020).

Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauhmana peran program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kecamatan Telaga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan program PKK telah banyak memberikan manfaat dalam pemberdayaan perempuan khususnya di Desa. Keberhasilan diperoleh berkat adanya dukungan pemerintah di tingkat kecamatan dan juga atas pembinaan langsung oleh pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Gorontalo kepada Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kecamatan hingga desa. Program PKK juga belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Hambatan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kapasitas masyarakat khususnya perempuan serta masih minimnya penguasaan terhadap teknologi. Untuk itu diperlukan partisipasi aktif dan dukungan penuh dari pemerintah dalam pengembangan dan maksimalisasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yakni suatu wadah yang di dalamnya memberikan binaan terhadap perempuan dan masyarakat baik di perkotaan sampai dipedesaan yang menghasilkan suatu proses bagi keluarga sejahtera yang mandiri, yang bisa menghasilkan sinergi untuk keluarga sejahtera yang mandiri dengan meningkatkan mental spiritual perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila. Dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan berbagai upaya atau usaha dan kegiatan, seperti meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, ikut mengupayakan dalam kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.

Berdasarkan hasil tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya yakni inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen sosial, dan perencanaan intervensi sosial, maka dihasilkanlah beberapa bentuk kegiatan intervensi sosial.

Draft Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Kelola Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa

Program ini adalah tindak lanjut dari kegiatan musyawarah desa terkait pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022. Pengusulan Draft Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Kelola Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Ilangata diinisiasi oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan seluruh mahasiswa.

Pelaksanaan program ini dilakukan secara 3 tahapan yaitu, pertama melakukan notulensi terhadap hasil musyawarah desa yang memiliki relevansi dengan program inti pada kegiatan pembahasan RanPerdes tentang RKPD 2023. Tahap kedua, melakukan harmonisasi dari hasil notulensi tersebut sehingga dapat dibuatkan draft rancangan Peraturan Kepala Desa yang secara spesifik mengatur tentang Tata Kelola Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Serta tahap terakhir ialah mengusulkan draft Rancangan Perkades tersebut kepada pemerintahan desa sebagai rujukan dalam mengelolah organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Ilangata.

Capacity Building Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata

Pelaksanaan program ini adalah bagian akhir dari tujuan dibentuknya kembali organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa Ilangata. Setelah dibentuknya Surat Keputusan oleh Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepengurusan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan telah diusulkan dasar yuridis dalam pelaksanaan pengelolaan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) maka

perlu untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pengembangan Kapasitas Kader yang akan mengelolah organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tersebut.

Pengembangan kapasitas kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dikemas dalam kegiatan workshop dengan model dialog secara terfokus dan pelatihan lebih khusus. Narasumber pada kegiatan ini adalah yang berkompeten pada bidang kesejahteraan sosial. Pembahasan terfokus pada pengembangan kapasitas kader sesuai dengan tupoksi kelompok kerja (pokja) masing-masing. Pengembangan kapasitas kader dengan pelatihan yang lebih khusus ditujukan pada pokja-pokja yang strategis seperti penekanan terhadap angka stunting di desa serta pengembangan kreativitas kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) guna menumbuhkan ekonomi desa. Kegiatan dalam peningkatan kapasitas terdiri dari:

Revitalisasi Organisasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata

Dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi organisasi ini, Dosen Pembimbing Lapangan dan mahasiswa dibantu oleh aparat desa Ilangata. Kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 bertempat di aula Desa Ilangata. Kegiatan revitalisasi ini bermaksud untuk menghidupkan Kembali suatu hal yang sebelumnya dianggap tidak bergerak atau tidak aktif sesuai tugas, peran, dan fungsinya. Sebuah organisasi yang tidak aktif perlu adanya pembaruan dari sistem yang lama ke sistem yang baru dan tentunya membawa organisasi tersebut ke arah yang lebih baik. Berikut merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan revitalisasi organisasi:

- 1) Pembukaan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bapak Sumarjin Moohulo selaku Kepala Desa Ilangata.



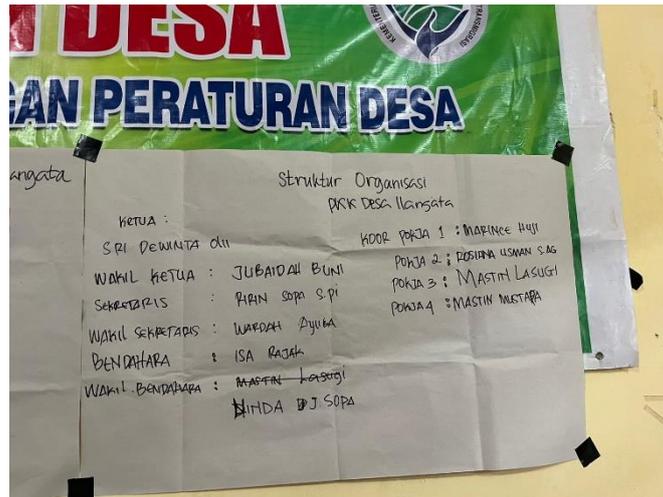
Gambar 2. Pembukaan kegiatan oleh Kepala Desa Ilangata

- 2) Penjelasan awal terkait keberadaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berdasarkan hasil asesmen sosial yang telah dilakukan sebelumnya.
- 3) Pemaparan kembali terkait hasil *Methodology Participatory of Assessment* (MPA) yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 7 November 2022.



Gambar 3. Pemaparan kembali hasil Teknik *Methodology Participatory of Assessment* (MPA)

- 4) Penyusunan anggota organisasi secara terstruktur yang akan disahkan dengan dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa Ilangata terkait susunan organisasi Tim Penggerak PKK, yang meliputi:
 - (a) Ketua : Sri Dewinta Olih
 - (b) Wakil Ketua : Jubaidah Buni
 - (c) Sekretaris : Ririn Sopa, S.Pi.
 - (d) Wakil Sekretaris : Wardah Ayuba
 - (e) Bendahara : Isa Rajak
 - (f) Wakil Bendahara : Ninda J. Sopa
 - (g) Koordinator POKJA I : Marince Huji
 - (h) Koordinator POKJA II : Rosiana Usman, S.Ag.
 - (i) Koordinator POKJA III : Mastin Lasugi
 - (j) Koordinator POKJA IV : Mastin Mustafa



Gambar 4. Struktur Organisasi Tim Penggerak PKK Desa Ilangata Tahun 2022 – 2027

- 5) Membangun komitmen bersama (Janji Hati). Semua *target group* yang hadir dalam kegiatan ini diminta untuk menyatakan komitmennya secara bersama yang dituangkan dalam lembar kesepakatan, kemudian ditandatangani oleh seluruh *target group* yang dalam hal ini adalah anggota organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata.



Gambar 5. Janji Hati Tim Penggerak PKK Desa Ilangata

- a. Bimbingan Teknis Terkait Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara umum
 Bimbingan teknis yang dimaksudkan mencakup pada pemberian materi tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara umum yang terdiri sejarah, tugas dan fungsi PKK di masyarakat, program kerja, dan tata cara penyusunan tugas dan wewenang dari tiap-tiap program kerja.

Setelah diberikan materi ini terlihat adanya antusias dan ketertarikan dari seluruh *target group* untuk belajar kembali dan menjalankan kembali organisasi ini.



Gambar 6. Pemberian Materi Selayang Pandang Tentang Organisasi Tim Penggerak PKK

- b. Bimbingan Teknis terkait Program Kerja VI bidang Kesehatan dengan tema “Pencegahan Stunting”.

Pada kegiatan ini dilakukan pemberian materi terkait “Pencegahan Stunting” yang selaras dengan target dari Kabupaten Gorontalo Utara terkait stunting serta program kerja IV bidang Kesehatan. Narasumber pada kegiatan ini adalah yang berkompeten pada bidang kesejahteraan sosial yaitu Ibu Lastris, S.Tr.Sos.

- c. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Ilangata.

Pelatihan kewirausahaan yang dilakukan ini sebagai bentuk untuk meningkatkan keterampilan dalam menciptakan produk sendiri sehingga bisa dijadikan sumber dana tambahan bagi organisasi Tim Penggerak PKK dan agar tiap anggota menjadi produktif. Adapun bentuk pelatihan yang diberikan yakni membuat nama produk, cara membuat produk, pengemasan produk, dan promosi produk. Produk yang dimaksudkan dalam hal ini yakni, keripik pisang. Produksi keripik pisang ini merupakan hasil kesepakatan dari seluruh anggota Tim Penggerak PKK dan Kepala Desa yang difasilitasi oleh peneliti. Pemateri pelatihan dalam hal ini merupakan salah satu pelaku dunia usaha di Desa Ilangata yang saat ini sudah menjalankan usahanya dalam membuat keripik kurang lebih tiga tahun.



Gambar 7. Pemberian Materi Selayang Pandang Tentang Organisasi Tim Penggerak PKK

Evaluasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Dalam mewujudkan program-program yang telah disusun secara sistematis pada kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ini, peneliti menemukan beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang akan dijabarkan dengan menggunakan teknik analisis SWOT.

Tabel 1. Analisis Faktor Internal dan Eksternal menggunakan Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">Strength (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Antusias para <i>target group</i> atau anggota PKK dalam mengaktifkan kembali organisasi yang sebelumnya sempat tidak aktif. ✓ Adanya keinginan dari tiap-tiap anggota PKK untuk memperoleh materi terkait organisasi PKK serta dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai anggota PKK sesuai dengan tupoksi masing-masing. ✓ Adanya dukungan dan partisipasi dari aparat Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat ini. 	<p style="text-align: center;">Weakness (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Luas wilayah desa dan jumlah penduduk yang cukup padat di desa Ilangata menjadi penghambat proses pengumpulan data-data dalam memetakan masalah-masalah yang ada di desa. ✓ Penyesuaian dan penentuan waktu kegiatan yang harus disesuaikan dengan waktu senggang <i>target group</i>.
<p style="text-align: center;">Opportunity (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya kolaborasi yang baik sejak awal antara Kepala Desa, Perangkat Desa Ilangata dan Peneliti baik secara komunikasi maupun hal konkrit lainnya yang mendukung terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Ilangata. 	<p style="text-align: center;">Threat (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya beberapa benturan kepentingan secara politis antara Pemerintah Desa (Pemdes) dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), contohnya terdapat beberapa perbedaan pemikiran dalam membangun Desa antara Kepala Desa dengan Ketua Karang Taruna Desa.

KESIMPULAN

Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata terbilang tidak aktif dan tidak berjalan sesuai dengan peran dan fungsi dari tiap-tiap anggota. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat dengan program berjudul “*Capacity Building*

Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ilangata Kecamatan Anggrek liti Kabupaten Gorontalo Utara, peneliti mampu memfasilitasi dalam mengaktifkan kembali organisasi dengan didasari oleh dasar hukum yakni Surat Keputusan Kepala Desa Ilangata tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Tp. PKK Desa Ilangata Nomor 41 Tahun 2022. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan *capacity building* yang meliputi pemberian materi, wawasan, dan keterampilan bagi seluruh anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan tujuan agar anggota organisasi dalam mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun secara kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Benediktus Vito, Hetty Krisnani, & Risna Resnawaty, (2015), *Kesenjangan Pendidikan dan Kota. Prosiding Riset & PKM*.
- Iskandar, A.Halim. (2016), *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta.
- Kementerian Keunga Republik Indonesia, (2021), *Daftar Alokasi Dana Desa Tahun 2021*, Jakarta.
- Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022*, (Online), (<https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>, diakses 26 November 2022)
- Profil Desa Ilangata Kecamatan Anngrek Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022
- Moh.Fadli, dkk, (2013), *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Sleman: UB Press.
- Nikma Wahyuni Hanis, dkk, (2020). Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi* (Online), Volume 8, No. 2, (<http://jurnal.umgo.ac.id/index.php/Publik>, diakses 26 Desember 2022).
- Wahyudin Kesa. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta, Cetakan Pertama:Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Rizki Ayundari Putri. 2020. *Jurnal: Pengembangan Kapasitas Kewirausahaan Perempuan Kepala Keluarga di Kp. Sindanglayung Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur*. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- Rukminto, dkk. 2008. *Intervensi Komunitas (Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.